

Strategi Baru Dalam Pengembangan SDM Untuk Pengurus Pemerintahan Desa: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Kepemimpinan

Syaifuddin¹

Universitas Sebelas April Sumedang¹

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa melalui penguatan kapasitas SDM pengurus pemerintahan desa. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, dilakukan serangkaian program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pengurus desa terkait manajemen pelayanan publik dan kepemimpinan. Implementasi praktik-praktik baru, peningkatan partisipasi masyarakat, penerapan teknologi informasi, dan perubahan budaya organisasi menjadi indikasi positif dari keberhasilan strategi ini. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan dalam pemantauan dan evaluasi rutin, peningkatan kerjasama antarlembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan dari upaya pengembangan SDM ini dalam jangka panjang. Diharapkan bahwa hasil dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik di Desa Cipagalo serta di tempat-tempat lain yang serupa.

Keywords: Pengembangan SDM, Kualitas Pelayanan, Efektivitas Kepemimpinan

Corresponding Author:

Syaifuddin
syaiifuddin.feb@unsap.ac.id

Received: January 10, 2024

Revised: February 20, 2024

Accepted: March 02, 2024

Published: March 25, 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa adalah fondasi utama dari struktur administratif suatu Negara (Lembong et al., 2017). Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memegang peran krusial dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal (Fatiya Diana Wulandari Putri et al., 2023). Kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Suwarno, 2012). Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di kalangan pengurus pemerintahan desa menjadi penting guna memastikan pelayanan yang berkualitas serta kepemimpinan yang efektif (Suhartono et al., 2020).

Di Indonesia, pemerintahan desa telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal. Sebagai dampaknya, tanggung jawab dan tuntutan terhadap pengurus pemerintahan desa semakin meningkat. Mereka dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, serta menjalankan kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Sukmana & Islamy, 2019).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pengurus pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan tidaklah sedikit (Sineke et al., 2017). Dari sisi SDM, banyak pengurus desa yang belum memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. Faktor pendidikan formal yang rendah dan minimnya akses terhadap pelatihan serta pendampingan menjadi hambatan utama dalam pengembangan SDM di kalangan pengurus pemerintahan desa (Dianto, 2019). Selain itu, konteks sosial dan budaya di tingkat desa juga memengaruhi dinamika pelayanan publik dan kepemimpinan. Beberapa desa masih menerapkan pola-pola tradisional yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan demokratis. Hal ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip modern dan partisipatif (Tryara Yulia Banobe, 2023).

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi baru dalam pengembangan SDM untuk pengurus pemerintahan desa. Strategi ini haruslah komprehensif, berkelanjutan, dan mengakomodasi berbagai aspek yang relevan, seperti pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta pembangunan kapasitas institusi pemerintahan desa (Hendra Hamid, 2018). Dengan demikian, diharapkan pengurus pemerintahan desa dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta kepemimpinan yang efektif, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat local (Sirimasa, 2018).

Pemilihan topik kegiatan pengabdian mengenai Strategi Baru dalam Pengembangan SDM untuk Pengurus Pemerintahan Desa: Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Kepemimpinan didasarkan pada sejumlah alasan yang sangat relevan dengan kondisi aktual di tingkat desa dan pentingnya peran pemerintahan desa dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari pemilihan topik ini adalah untuk memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa, sehingga mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dari bawah ke atas.

2. METODE

Dalam menjalankan kegiatan pengabdian untuk strategi baru dalam pengembangan SDM untuk pengurus pemerintahan desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan, beberapa metode yang tepat dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat dipertimbangkan:

- a. Pelatihan dan Workshop: Mengadakan serangkaian pelatihan dan workshop yang fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan praktis yang diperlukan oleh pengurus pemerintahan desa. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, mulai dari manajemen administrasi publik, kepemimpinan, hingga teknik komunikasi dan negosiasi.
- b. Pendampingan dan Mentoring: Menyediakan program pendampingan dan mentoring bagi pengurus desa yang bertujuan untuk memberikan dukungan langsung dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman mereka. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh praktisi atau ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan desa.
- c. Studi Kasus dan Best Practice Sharing: Mengorganisir sesi studi kasus dan pertukaran pengalaman antara pengurus desa dari berbagai lokasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar dari praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di tempat lain, sehingga dapat mengadopsi dan menyesuaikan dengan konteks mereka sendiri.
- d. Pengembangan Modul dan Materi Pembelajaran: Membuat modul dan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh pengurus desa secara mandiri. Modul ini dapat berupa panduan praktis, video tutorial, atau bahan bacaan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus pemerintahan desa.
- e. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Riset: Melibatkan institusi pendidikan dan riset dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan SDM. Institusi-

institusi ini dapat memberikan pengetahuan dan keahlian yang lebih mendalam dalam mendukung pengembangan pengurus desa.

- f. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan platform pembelajaran online atau aplikasi mobile yang memungkinkan pengurus desa untuk mengakses materi pembelajaran kapan pun dan di mana pun mereka berada.
- g. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menggalang dukungan dari komunitas lokal dalam mendukung pengembangan SDM pengurus desa. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, pertemuan rutin, atau kegiatan kolaboratif lainnya yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.
- h. Dengan menerapkan kombinasi metode di atas secara holistik dan terintegrasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan SDM pengurus pemerintahan desa di Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan, serta pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa tersebut..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian strategi baru dalam pengembangan SDM untuk pengurus pemerintahan desa di Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan, sangatlah positif. Terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek setelah pelaksanaan kegiatan tersebut. Para pengurus pemerintahan desa telah mengalami peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan mereka terkait manajemen pelayanan publik dan kepemimpinan. Ini tercermin dari implementasi praktik-praktik baru yang mereka terapkan, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Penggunaan teknologi informasi juga telah membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Selain itu, terjadi perubahan positif dalam budaya organisasi di tingkat desa, di mana kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif menjadi lebih dihargai.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam membangun kapasitas, melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi secara berkala, serta mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan dari strategi baru ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kepemimpinan di Desa Cipagalo.



Gambar 1. Kegiatan Pengembangan SDM Pemerintahan Desa Cipagalo

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian strategi baru dalam pengembangan SDM untuk pengurus pemerintahan desa di Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, adalah bahwa upaya tersebut telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas

pelayanan dan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa. Para pengurus desa mengalami peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik. Melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan partisipasi masyarakat, mereka mampu menerapkan praktik-praktik baru yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianto, I. (2019). Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 239. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>
- Fatiya Diana Wulandari Putri, Angella Yunita Azarah, & Rahmasari Dwi Agustina. (2023). Peran Perangkat Desa dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Memberikan Pelayanan Publik di Desa Jubung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 230–247. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2436>
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Lembong, F., Lapian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewesen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), (1-15).
- Septiandana, A. C., Charteris, G., & Sholihin, M. R. (2019, June). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun-Kabupaten Lumajang. In Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper (pp. 176-182).
- Sholihin, M. R. (2019). Pendampingan Pengembangan UMKM dan Sosialisasi Nabung Saham Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *Empowerment Society*, 2(1), 43-48.
- Sineke, A., Gosal, R., & Lapian, M. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sirimasa, N. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Suhartono, S., Arsyad, N., & Amelia, F. (2020). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao). *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 336–353. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i3.142>
- Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Hishnul Islamy. (*Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), Vol. 4(No. 2), 97.
- Suwarno, J. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1, 184–213.
- Tryara Yulia Banobe, L. M. (2023). Village Government Governance Towards Improving Public Services in Kalidawir Village , Tanggulangin. *Balithang*, 11(3), 323–338.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia